

Kecamatan Bontocani, 1960-1979.

Awaluddin Isfar; Asmunandar; Bustan

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
iawal6377@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum Kecamatan Bontocani sebelum tahun 1960, perkembangan Kecamatan Bontocani dari tahun 1960-1979, serta dampak pembentukan Kecamatan Bontocani pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan infrastruktur dalam kurun waktu (1960-1979). Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan beberapa tahapan kerja yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi (penulisan karya sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bontocani sebelum tahun 1960 merupakan daerah hutan yang minim akan akses jalan. Sistem pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan *Akkarungeng* (kerajaan lokal) yang kemudian berubah menjadi pemerintahan distrik. Kehidupan masyarakat yang sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bertani secara tradisional. Setelah menjadi sebuah kecamatan dan dipimpin oleh seorang camat, Bontocani perlahan mulai mengalami perkembangan diberbagai bidang. Camat pertama yang memerintah di Kecamatan Bontocani yaitu Andi Mappanganro (Petta Cani), kemudian dilanjutkan camat kedua oleh seorang tentara yaitu Letnan Saguni Dewa. Pada pemerintahan camat kedua ini, perkembangan Kecamatan Bontocani jauh lebih baik ditandai dengan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan infrastruktur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setelah terbentuk menjadi sebuah kecamatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur penunjang memberikan dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Akhir penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pembentukan Kecamatan Bontocani memberikan perkembangan yang lebih baik di berbagai bidang serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Kecamatan Bontocani, Andi Mappanganro, Saguni Dewa

Abstract

This study aims to find out the general description of Bontocani District before 1960, the development of Bontocani District from 1960-1979, and the impact of the formation of Bontocani District on the social, economic, educational and infrastructure fields in the period (1960-1979). This research is a historical research with descriptive analysis. The research method used is the historical method with several stages of work, namely heuristics (collection of sources), source criticism, interpretation and historiography (writing of historical works). The results of this study indicate that the Bontocani District before 1960 was a forest area with minimal road

access. The government system at that time was the Akkarungeng (local kingdom) government which later changed to a district government. People's lives are very simple by utilizing natural resources by means of traditional farming. After becoming a sub-district and led by a sub-district head, Bontocani slowly began to develop in various fields. The first sub-district head who ruled in Bontocani District was Andi Mappanganro (Petta Cani), then followed by the second sub-district head by a soldier, Lieutenant Saguni Dewa. In the second sub-district administration, the development of the Bontocani Sub-district was much better marked by the development carried out in various fields including the social, economic, education and infrastructure fields. The results also show that after being formed into a sub-district, improving the quality of human resources and supporting infrastructure has an impact on improving the community's economy. At the end of the study, it can be concluded that with the establishment of the Bontocani District, it will provide better development in various fields and have a positive impact on people's lives.

Keywords: Bontocani District, Andi Mappanganro, Saguni Dewa

A. PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi dengan ibu kotanya adalah Makassar. Dalam mengembangkan sistem desentralisasi, Sulawesi Selatan membawahi 24 kabupaten/kota dengan rincian 21 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten/Kota yang terdapat di Sulawesi Selatan yakni Makassar, Pare-Pare, Palopo, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara

Kabupaten Bone (Kerajaan Bone) sejak abad XIV merupakan salah satu daerah atau kerajaan terluas di Sulawesi Selatan (Bahri, 2016) dan sekarang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Secara geografis letak Kabupaten Bone sangat strategis karena merupakan pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang merupakan pantai Barat Teluk Bone. Memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari Utara ke Selatan menelusuri Teluk Bone tepatnya 174 Kilometer sebelah Timur Kota Makassar. Tak hanya daerah pesisir, Kabupaten Bone juga terkenal dengan hasil pertaniannya, baik persawahan dan juga perkebunan di dataran rendah serta penghasil rempah-rempah yang terdapat di daerah dataran tinggi (Syukur, 2019). Sebelum resmi menjadi sebuah kabupaten, dahulu Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang terdapat di Sulawesi Selatan. Setelah diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda, Bone dijadikan sebagai pemerintahan *Afdeling* yang setingkat dengan kabupaten dan dipimpin oleh Asisten Residen (Akbar et al., 2020). Setelah Indonesia merdeka, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah tingkat I termasuk pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Selatan, kemudian disusul Undang-Undang Nomor 13 tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Pemerintah swapraja (*Onderafdeling*) diubah menjadi daerah tingkat II (kabupaten) maka pada saat itu Kerajaan Bone berganti nama menjadi Kabupaten Bone.

Jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan yakni Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Palakka, Awangpone, SibuluE, Barebbo, Ponre, Cina, Mare, Tonra,

Salomekko, Patimpeng, Kajuara, Bontocani, Kahu, Libureng, Lappariaja, Bengo, Lamuru, Tellu LimpoE, Ulaweng, Amali, Ajangale, Dua BoccoE, Tellu SiattingE dan Cenrana. Kecamatan Bontocani merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone. Terletak di bagian selatan Kabupaten Bone, kecamatan ini berbatasan langsung dengan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gowa, Sinjai dan Maros. Luas wilayah Kecamatan Bontocani mencapai 463 Km² dan merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bone dengan persentasi 10 persen dari wilayah Kabupaten Bone. Secara administratif, Kecamatan Bontocani juga merupakan kecamatan nomor satu di Kabupaten Bone, hal ini dapat dilihat dari kode wilayah yakni 730801. 73 merupakan kode Sulawesi Selatan, 08 merupakan kode Kabupaten Bone dan 01 merupakan kode Kecamatan Bontocani (Achdal, 2021).

Kecamatan Bontocani membawahi 11 desa/kelurahan dengan rincian 10 desa dan 1 kelurahan yakni Desa Watangceni, Pattuku, Bontojai, Bulusirua, Langi, Erecinnong, Bana, Pammusureng, Mattirowalie, Lamoncong dan Kelurahan Kahu. Seluruh wilayah Kecamatan Bontocani terletak didataran tinggi dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl hingga 1000 mdpl. Kondisi wilayah Kecamatan Bontocani adalah daerah pegunungan dengan curah hujan dan kelembapan tinggi serta jenis tanahnya yang subur sehingga mayoritas perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Pada saat Belanda masih berkuasa di daerah Sulawesi Selatan khususnya daerah Kabupaten Bone, wilayah Kecamatan Bontocani dahulu terbagi menjadi dua *akkarungeng* (kerajaan). Dua kerajaan besar yang terdapat di daerah Bontocani adalah kerajaan Bontorihu dan Cani. Pemerintahan kerajaan Bontorihu dan Cani membawahi kerajaan-kerajaan lokal yang terdapat di daerah Bontocani. Pada saat Belanda tidak lagi berkuasa hingga masa gerilyah di Sulawesi Selatan, maka sistem pemerintahan di Bontocani berubah menjadi KDT (komando/kesatuan distrik) yang merupakan pemerintahan tidak resmi DI/TII.

Bontocani sebelum menjadi sebuah kecamatan yang merupakan pemerintahan secara resmi pada tahun 1960, masyarakat pada awalnya hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah membuat perkampungan baru. Hal itu dilakukan dengan tujuan membuka lahan pertanian yang baru yang lebih subur dan meninggalkan lahan pertanian yang lama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pertanian masyarakat awalnya hanya dilaksanakan secara tradisional sehingga hasilnya pun sangat minim. Selain hal tersebut, keadaan perang gerilyah dan kondisi yang tidak kondusif juga membuat masyarakat ketakutan untuk tinggal menetap.

Setelah Kecamatan Bontocani secara resmi terbentuk dan dipimpin oleh seorang camat, secara perlahan wilayah Kecamatan Bontocani mulai berkembang. Perkembangan tersebut ditandai dengan mulainya diadakan penataan perumahan masyarakat yang dari perkampungan-perkampungan berkelompok diarahkan ke pinggiran jalan poros, pengembangan sistem pertanian yang awalnya dilakukan secara tradisional mulai mendapatkann bantuan dari pemerintah, serta pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa mulai dikembangkan.

Ketertarikan meneliti tentang Kecamatan Bontocani yaitu karena pada awalnya daerah ini hanyalah perkampungan-perkampungan tradisional, namun setelah terbentuk menjadi sebuah kecamatan memberikan perkembangan yang pesat bagi ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Selain hal tersebut terdapat sungai Walannae yang berhulu di Kecamatan Bontocani. Daerah sekitar aliran sungai Walannae umumnya adalah daerah persawahan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian penduduk dan sedikit

banyaknya telah mendongkrak perekonomian dan status sosial masyarakat sekitar.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi bukan hanya sekedar kerja teknis semata, akan tetapi dalam metodologi termuat teori teori ataupun kerangka pemikiran, terutama dalam menentukan pendekatan yang digunakan (Daliman, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian sejarah deskriptif analisis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasikan Kecamatan Bontocani. Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan mengungkap peristiwa masa lampau sehingga jelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering diberlakukan pada ilmu-ilmu kebudayaan yang mencakup humaniora, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan menemukan gejala-gejala yang unik atau individual (Sugeng Priyadi, 2013). Dalam metodologi terdapat didalamnya adalah metode, inti pokok dalam metode khususnya metode penelitian sejarah meliputi *heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi* (Daliman, 2018).

1. Heuristik

Untuk mencoba menjelaskan kembali pembentukan dan perkembangan Kecamatan Bontocani tahun 1960-1979, hal yang pertama dilakukan peneliti yakni mengumpulkan data-data dan sumber yang relevan dengan tema penelitian yang dikenal dengan istilah heuristik (Helius Sjamsuddin, 2012). Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber pertama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan memengaruhi tempat (di mana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya (Hamid & Majid, 2013). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Penelitian Lapangan

Proses penelitian di lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara yakni dengan mewawancarai narasumber yang dianggap mampu memberikan data-data yang dibutuhkan yakni para pelaku secara langsung, saksi mata, ataupun seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Kecamatan Bontocani. Beberapa narasumber yang akan diwawancarai yaitu mantan Lurah Kahu, beberapa kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Pada tahap wawancara peneliti melakukann interaksi dan komunikasi verbal antara pewawancara dengan responden (narasumber). Langkah yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula kepada narasumber yang dianggap kompeten untuk mendapatkann sejumlah informasi yang diinginkan (Zuriah, 2009). Calon peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dibutuhkan dalam penelitian tentang Kecamatan Bontocani.

b. Penelitian Pustaka

Pada tahap ini calon peneliti mengumpulkan data pustaka dengan mengunjungi beberapa lembaga penyedia seperti perpustakaan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, perpustakaan umum Universitas Negeri Makassar, perpustakaan prodi pendidikan sejarah dan beberapa lembaga penyedia bahan pustaka yang dapat dijadikan bahan-bahan referensi dalam penelitian tentang Kecamatan Bontocani.

2. Kritik Sumber

Setelah tahap penelusuran dan pengumpulan sumber dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Tidak semua sumber yang telah dikumpulkan dapat menjadi data dalam sebuah penelitian penyusunan teks sejarah. Terlebih

dahulu dilakukan penyeleksian dengan cara kritik sumber, metode kritis sejarah merupakan bentuk keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan atau dikumpulkan (Sugeng Priyadi, 2015). Pada tahap ini calon peneliti menguji keaslian, kebenaran dan validnya data yang telah ditemukan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan teks sejarah. Oleh sebab itu, data yang diperoleh pada tahapan heuristik terlebih dahulu dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta kemudian dikritik. Kritik dapat berupa kritik tentang kredibilitas isinya (kritik internal) dan juga tentang otentitasnya (kritik eksternal) (Sejarah, 2013).

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap penafsiran makna dari fakta-fakta yang telah ditemukan, atau hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Interpretasi mengharuskan seorang sejarawan dalam menafsirkan fakta dituntut untuk bersikap objektif dan melepaskan seluruh subjektivitasnya. Terdapat dua dorongan bagi seorang sejarawan dalam melakukan ekspalanasi (menjelaskan) peristiwa sejarah yaitu keinginnannya untuk mencipta ulang atau menafsirkan. Berdasarkan hal tersebut, kualitas tulisan sejarah sangat ditentukan dengan interpretasi dari peneliti.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan teks sejarah. Ketika telah masuk dalam tahapan penulisan sejarah, seorang sejarawan mengerahkan seluruh daya pikirannya bukan saja keterampilannya dalam menggunakan kutipan-kutipan, tetapi terutama penggunaan pikiran kritis serta analisisnya karena dituntut menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuannya itu dalam suatu penulisan yang utuh (Helius Sjamsuddin, 2012). Pada tahap ini, seorang sejarawan berusaha menyusun dan melakukan konstruksi dari hasil temuan-temuan dengan bahasa yang lugas, sederhana dan juga ilmiah agar dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pembaca. Secara sistematis metodologi sejarah dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data dan fakta dalam penelitian, di kritik dan diinterpretasikan dengan analisis yang mendalam kemudian disajikan secara deskriptif. Syarat pokok yang membatasi daya fantasi manusia dalam penyusunan cerita sejarah ialah urutan-urutan kejadian peristiwa secara tertentu (R Moh Ali, 2005). Proses penyajian atau penulisan teks sejarah yang disebut historiografi. Penyajian teks sejarah baru dapat dipercaya dan diyakini keabsahannya setelah melalui seluruh rangkaian metodologi penelitian sejarah.

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Kecamatan Bontocani yang merupakan lokasi penelitian secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Bone yang didominasi daerah dataran tinggi, berbukit-bukit, serta tanah yang subur. Kecamatan Bontocani berbatasan secara langsung dengan tiga kabupaten yakni Kabupaten Gowa, Maros, dan Sinjai. Daerah sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa adalah Desa Bontojai, daerah bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai adalah Desa Bana, sedangkan daerah yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Maros adalah Desa Mattirowalie. Akibat kondisi tersebut, maka sangat memungkinkan daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain ini berpotensi mendapat pengaruh baik segi budaya, bahasa maupun adat istiadat

D. PEMBAHASAN

1. Proses terbentuknya Kecamatan Bontocani

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Berdasar dari gagasan tersebut, maka struktur sistem pemerintahan dengan konsep desentralisasi dianggap pemerintah sebagai langkah yang efektif. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi ataupun kewenangan untuk mengatur suatu pemerintahan daerah sendiri (Muhammad Mujtaba Habibi, 2015). Dalam urusan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan dengan asas otonomi daerah, artinya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan dan penyerahan otonomi kepada daerah sejatinya merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi (Widjaja, 2012). Penerapan sistem tersebut akan memberikan peluang bagi tiap daerah untuk berkembang sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di masing-masing daerah. Kondisi tersebut kemudian akan menciptakan suasana kompetisi ataupun persaingan secara terbuka antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (Chalid, 2005). Sistem administrasi pemerintahan di wilayah Indonesia pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal ini sering diistilahkan dengan Swapraja. Wilayah atau daerah swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Daerah swapraja juga salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintahan kolonial dan mencakup berbagai jenis administrasi pemerintahan seperti kesultanan, kerajaan dan keadipatian.

Keinginan untuk mengadakan perubahan struktur pemerintahan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat adalah kebijakan yang tidak hanya menjadi keinginan pelaksana pemerintahan. Akan tetapi merupakan sebuah tuntutan dari arus bawah dan juga seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam tatanan kehidupan, sesuatu yang pasti dihadapi adalah perubahan dan perkembangan. Akibat dari hal tersebut diyakini bahwa struktur pemerintahan yang dipakai sebelumnya kurang mampu memecahkan suatu problem pada kehidupan masyarakat dan pembangunan secara umum serta adanya keinginan bersama untuk mengadakan perubahan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 yang dikeluarkan 15 Juni 1950, maka daerah-daerah yang dibentuk menjadi daerah/wilayah kewedanaan adalah daerah bekas *Afdeling*. Wilayah *Afdeling* tersebut terbagi kedalam tujuh daerah ini sesuai dengan keputusan Gubernur Timur Besar pada tanggal 24 Januari 1940 Nomor 21 salah satu afdling adalah Afdeling Bone, meliputi : Bone, Soppeng dan Wajo.

Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1959, pemerintah mengeluarkan undang-undang No 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi. Undang-undang No.29 tahun 1959 mengganti undang-undang darurat No 1, 2, 3, dan 4 tahun 1957 dan semua undang-undang serta peraturan pemerintah tentang perundangan yang bersangkutan pembentukan daerah-daerah *swantara* di Sulawesi. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 Oktober 1951 Nomor 604 tentang peraturan sementara untuk pemulihan. Pengangkatan para kepala kampung dan pelepasan distrik-distrik di Sulawesi Selatan tanggal 20 Februari 1959 Nomor 100 tentang Peraturan pemilihan kepala kampung. Pada awal terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, kendala utama yang dihadapi seluruh daerah lainnya di Sulawesi Selatan yakni dihadapkan untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya masing-masing yang telah berdiri

sendiri. Disisi lain, keterbatasan dana sehingga setiap wilayah terhambat dalam melakukann pembangunan.

Kemudian untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi struktur Pemerintahan Daerah, maka Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.1100/1961, dibentuk 21 Distrik di Daerah Tingkat II Bone, salah satunya yaitu Distrik Cani yang membawahi beberapa daerah sebagai salah satu wilayahnya namun pada saat itu Bontocani masih merupakan daerah hutan yang masuk dalam wilayah desa. Kemudian pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.2067/1961 tanggal 18 Desember 1961 menyatakan semua Distrik berubah nama menjadi sebuah kecamatan. Dikeluarkannya surat keputusan didasarkan atas pertimbangan untuk mencapai struktur pemerintahan yang seragam dan efisien di Indonesia secara umum daerah dan Sulawesi Selatan dan Tenggara secara khusus. untuk itu sangat penting untuk:

- a. Membubarkan distrik lama di daerah-daerah tingkat II dan daerah tingkat I di Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- b. Membentuk struktur pemerintahan baru yang disebut kecamatan di daerah tingkat II dalam Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Sebagai daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, Bone pada awalnya membawahi 21 kecamatan. Adapun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone yaitu Bontocani, Kahu, Kajuara, Libureng, Salomekko, Tonra, Mare, Lappa Riaja, Cina, Barebbo, Ammali, Awangpone, Tellusiatinge, Duaboccoe, Cenrana, Ajangale, Palakka dan Tanete Riattang. Adapun penamaan Bontocani ini dijelaskan oleh Andi Ambo:

Kalau untuk disini (Watangcani) dulu itu Cani saja namanya, namun ditambah *watang* setelah Bontocani terbentuk menjadi sebuah kecamatan. Alasan daerah ini dinamakan Cani karena di sana (menunjuk ke suatu tempat) ada dulu madu yang menetes dan sekarang menjadi batu sehingga disini dinamakan Cani. Sedangkan Bontorihu itu memang dari dulu namanya itu, tapi kalau dieja memang benar bahwa *bonto* itu gunung dan disana banyak gunung sedangkan *rihu* dalam bahasa *dentong* berarti banyak. Waktu dulu dirumuskan Nama Bontocani itu diambil dari penggabungan Bontorihu dan Cani (Ambo, 2021).

Berdasarkan pendapat tersebut nama Bontocani merupakan penggabungan dari dua kerajaan yang pernah berkuasa yaitu Bontorihu dan Watangcani. Maka dalam penamaannya diambil Berdasarkan nama masing-masing *akkarungeng* (kerajaan) sehingga dinamaknlah Bontocani. Pendapat lain menyebutkan bahwa asal usul penamaan Bontocani yakni karena daerah Bontocani merupakan daerah pegunungan atau dalam bahasa bugis disebut *bonto* sedangkan kata *cani* juga merupakan bahasa bugis yang berarti madu. Ini menggambarkan bahwa daerah Bontocani merupakan daerah pegunungan yang banyak ditemukan madu.

Camat pertama yang memerintah di Kecamatan Bontocani adalah Andi Mappanganro atau lebih dikenal dengan Petta Cani. Sebelum daerah Bontocani menjadi sebuah kecamatan, beliau menjabat sebagai *sullewatang* Watangcani pada masa Hindia Belanda. *Sullewatang* merupakan kepala pemerintahan yang setingkat dengan pemerintahan desa sekarang namun daerahnya lebih luas. Pada saat daerah Bontocani dikuasai oleh pemerintahan DI/TII, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala distrik kemudian setelah daerah Bontocani resmi menjadi sebuah kecamatan beliau menjadi camat pertama di Kecamatan Bontocani. Setelah menjabat sebagai camat beliau kemudian digantikan oleh seorang tentara yang bernama Letnan Saguni Dewa.

2. Pemerintahan Andi Mappanganro 1960-1967

Pada awalnya daerah Bontocani dihuni oleh masyarakat yang latar belakangnya dari sistem pemerintahan kerajaan. Dinamika kehidupan yang terus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya membuat masyarakat sulit untuk berkembang. Dari jaman penjajahan Belanda hingga masa setelah kemerdekaan telah dilaksanakan sistem pemerintahan yang berbeda. Pada awalnya daerah Bontocani yang merupakan daerah kerajaan yang dipimpin oleh *arung* (raja lokal) dibawah naungan arumpone beralih menjadi pemerintahan *sullewatang*. Kemudian dari *sullewatang* berubah menjadi pemerintahan distrik hingga menjadi sebuah kecamatan.

Kecamatan Bontocani saat resmi terbentuk menjadi sebuah kecamatan yang merupakan pemerintahan resmi awalnya dipimpin oleh Andi Mappanganro. Dalam periode pemerintahan Andi Mappanganro atau dalam sebutan lain Petta Cani telah dilaksanakan sistem pemerintahan secara resmi yang sebagaimana mestinya.

a. Bidang pemerintahan

Sistem pemerintahan kecamatan sejak berdirinya menjadi sebuah kecamatan dilaksanakan secara terstruktur dengan berbagi jabatan yang memiliki fungsinya masing-masing. Adapun struktur dan tata kerja di Kecamatan Bontocani:

1) Camat

Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten Bone adalah :

- a) Camat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- b) Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan bupati kepada camat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut camat mempunyai fungsi sebagai berikut
 - a) Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan
 - b) Membantu Sekretaris daerah kabupaten Bone dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan bupati.
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas desa/kelurahan.

2) Sekretaris

Sekretaris kecamatan adalah unsur staf. Sekretaris kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Adapun tugas Sekretaris kecamatan adalah membantu camat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan dan penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan serta koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas desa/kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretaris camat memiliki fungsi:

- a) Urusan administrasi keuangan
- b) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya
- c) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Sekertariat kecamatan terdiri dari:
 - a) Urusan perencanaan
 - b) Urusan umum

Urusan-urusan tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala urusan kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekertariat kecamatan. Adapun tugas dari masing-masing sebagai berikut:

- a) Urusan perencanaan mempunyai tugas melakukann penyusunan laporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan
- b) Urusan umum mempunyai tugas melakukann urusan ketata usahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintah umum dan pemerintahan lintas desa/kelurahan, administrasi kependudukan serta ketentraman/ketertiban. Untuk menjalankan tugas seksi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan lalu lintas desa dan kelurahan.
- b) Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan serta pembinaan polisi pamong praja. Seksi pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub seksi pemerintahan umum dan desa/kelurahan
- 2) Sub seksi kependudukan
- 3) Sub seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban. Semua sub seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi pemerintahan. Tugas ketiga sub pemerintahan ini adalah:

- a) Sub seksi pemerintahan umum dan desa/kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintah umum dan pemerintahan lintas desa/kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- 1) Sub seksi kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.
- 2) Sub seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan polisi pamong praja.

4) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan adalah unsur adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan dibidang pembangunan masyarakat lintas desa/kelurahan. Seksi pembangunan masyarakat lintas desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas melakukann perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, distribusi dan kesejahteraan sosial lintas desa/kelurahan serta lingkungan hidup. Fungsi seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan:

- a) Penyusunan program dan pembinaan bangunan sarana dan prasarana, pembinaan pelayanan umum lintas desa/kelurahan.
- b) Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi lintas desa/kelurahan.
- c) Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan lalu lintas desa/kelurahan. Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan terdiri dari:
 - 1) Sub seksi sarana/prasarana dan pelayanan umum
 - 2) Sub seksi perekonomian, produksi dan distribusi

- 3) Sub seksi kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Adapun tugas setiap sub seksi pembangunan:
 - a) Sub seksi sarana dan prasarana dan pelayanan umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program-program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum lintas desa/kelurahan.
 - b) Sub seksi perekonomian, produksi dan distribusi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi lintas desa/kelurahan.
 - c) Sub seksi kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga, keagamaan, sosial, budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda, pemberdayaan perempuan serta pembinaan pelestarian lingkungan lintas desa/kelurahan.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat dan bertanggung jawab oleh camat. Jumlah jabatan fungsional ini ditentukan Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mencerdaskan kehidupan manusia (Syukur, 2017). Sektor pendidikan sangat penting kedudukannya bagi umat manusia baik sebagai fungsinya untuk mencerdaskan maupun dalam pertimbangan bila ingin mencari pekerjaan kelak. Sebagai sebuah daerah yang mendapat hak otonomi, tentunya harapan besar pemerintah setempat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera adalah mimpi indah untuk diwujudkan. Sejak kecamatan Bontocani terbentuk dan dipimpin oleh Petta Cani sistem pendidikan pada saat itu masih kacau balau. Meski sudah ada beberapa sekolah pada waktu itu namun semangat masyarakat untuk mengenyam pendidikan masih rendah.

Pembentukan Kecamatan Bontocani memperpendek jarak geografis permukiman penduduk dengan sentra pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama mantan lurah Kahu sebagai berikut:

"Pada awalnya itu sekolah disini hanya 10 itupun hanya sekolah dasar. Adapun sekolah yang ada yaitu SD 289 Watangcani, SD 289 Bontojai, SD 290 Bontojai juga yang sekarang menjadi Desa Bulusirua, 291 KAHU yang dulu Desa Pammusureng, SD 292 Pammusureng, SD 293 Pattuku, SD 294 Erecinnong yang dulu daerahnya Pattuku, SD 295 Langi, SD 296 Bana dan SD 297 Cani. Karena pada waktu itu kan hanya enam desa jadi yang dua sekolahnya itu Desa Watangcani, Bontojai, Pattuku, dan Pammusureng yang sekarang sudah mekar menjadi 10 desa (Achdal, 2021)."

Berdasarkan ketereang tersebut menggambarkan bahwa sejak mulai terbentuknya kecamatan, sekolah dasar sudah ada beberapa di Kecamatan Bontocani namun untuk tingkat SMP dan SMA belum ada.

c. Bidang Ekonomi

Perekonomian masyarakat Bontocani sebagian besar memang bergantung pada pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta jenis tanahnya

yang subur. Meski demikian sistem pertanian masyarakat pada waktu itu masih menggunakan sistem tradisional. Berikut hasil wawancara yang disebutkan oleh Manna:

“Jadi dulu itu kita bertani caranya sangat tradisional sekali, tidak ada yang namanya pakai traktor dan alat-alat sebagainya. Kita berpindah-pindah buka hutan untuk digarap. Jadi yang kita tanam itu jagung dulu, nanti kalau jagung sudah mau dipanen baru kita tanami padi di selah-selahnya itupun lima bulan baru bisa dipanen dan hasilnya belum cukup untuk dimakan (Manna, 2021).”

Dalam periode pemerintahan Petta Cani perekonomian masyarakat memang masih tidak stabil. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh masa gerilya pada waktu itu. Kondisi keamanan yang belum kondusif membuat masyarakat kesulitan dalam bidang perekonomian.

Seperti yang kita ketahui bersama pemberontakan Kahar Muzakkar periode kedua itu terjadi dalam periode 1953-1965. Berdasarkan hal tersebut, masa pemerintahan Andi Mappanganro ini sebagian berada dalam periode perang gerilyah yang terjadi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kecamatan Bontocani secara khusus. Namun setelah Kahar Muzakkar ditembak mati pada tahun 1965 dan merupakan akhir dari pemberontakan di Sulawesi selatan.

3. Pemerintahan Andi Mappanganro 1960-1967

Letnan Saguni Dewa menjadi camat kedua yang memerintah di Kecamatan Bontocani menggantikan camat sebelumnya yaitu Andi Mappanganro alias Petta Cani. Penunjukan Letnan Saguni Dewa sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang notabennya TNI tak lepas dari pemerintahan presiden kedua RI yakni Soeharto. Dwifungsi ABRI

Dalam periode pemerintahan camat kedua yang menjabat di Kecamatan Bontocani, dsinilah awal perkembangan Bontocani di berbagai bidang. Pemerintahan Saguni Dewa telah membawa dampak positif bagi masyarakat Bontocani baik bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan infrakstrukt. Berikut pemaparan secara terperinci perkembangan Kecamatan Bontocani dalam periode pemerintahan Letnan Saguni Dewa.

a. Bidang pemerintahan

Dalam periode pemerintahan camat kedua yang menjabat di Kecamatan Bontocani tidak banyak berubah dalam segi struktur dan fungsinya mengingat hal tersebut memang bukan kewenangan camat. Adapun hal yang dilakukan dalam pemerintahan Saguni Dewa adalah memindahkan ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan camat dan stafnya berkantor tercatat telah mengalami pemindahan beberapa kali. Berikut hasil wawancara dengan Jerre:

“Jadi pak Saguni yang jadi camat itu dulu di Cani dan tidak lama disana dia pindahkan kantor kecamatan ke Pattuku. Kan dulu kantornya itu masih rumah panggung, jadi itu diangkat dibawa ke Pattuku dalam bentuk rumah. Masyarakat dulu dipanggil semua untuk angkat itu kantor lewat Bautenning naik. Alasan dipilih Pattuku menjadi ibu kota karena dianggap pertengahan antara Watangcani dengan Bontojai. Nah tidak lama di Pattuku dipindahkan lagi ke Bontojai tapi kantornya dibuatkan yang baru disini (Bontojai). Tidak lama juga di Bontojai, mungkin sekitar 2 tahun dipindahkan lagi ke Pammusureng itu yang sekarang menjadi ibu kota kecamatan. Tapi kan sekarang mekar jadi Kelurahan Kahu tapi dulu itu masih Desa Pammusureng namanya. Alasannya dipindahkan karena terlalu jauh katanya kalau disini, kalau di Pammusureng kan lebih dekat memang dengan Kecamatan Kahu (Jerre, 2021).”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Saguni Dewa kantor kecamatan telah dipindahkan sebanyak tiga kali. Alasan pemindahan tersebut tentunya mempertimbangkan tentang jarak dan akses antara pusat pemerintahan kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Pemerintahan Saguni Dewa juga menekankan pada pembagian wilayah administratif pemerintahan dibawah kecamatan yakni desa. Pada awal berdirinya menjadi sebuah Kecamatan, di Bontocani hanya ada enam desa yakni Desa Watangcani, Pattuku, Bontojai, Bana, Pammusureng dan Langi. Pada masa pemerintahan sebelum menjadi kecamatan tidak ada batasan yang jelas yang membatasi suatu desa dengan desa yang lainnya. Hingga akhirnya saat Saguni menjabat sebagai camat, ia kemudian memberikan perbatasan antara desa dengan menanam pohon kelapa. Alasan mengapa pohon kelapa dijadikan sebagai batas wilayah selain sungai, karena pohon kelapa dianggap sebagai tanaman yang bisa hidup di daerah manapun, baik jenis tanah yang subur maupun tanah yang tandus sekalipun.

b. Bidang Pendidikan

Hak untuk mendapatkann pendidikan memang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan merupakan bagian bagian dari upaya untuk memampukan setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat tumbuh menjadi manusia yang berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Untuk itu, setiap warga negara berhak mendapatkann pendidika yang layak.

Kecamatan Bontocani pada awalnya memiliki 10 sekolah dasar, namun dalam mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maka perlu diadakan penambahan jumlah sekolah. Dengan dikeluarkannya Instruksi presiden bulan 10 tahun 1973 yang dikenal INPRES, maka didirikan lagi sekolah yang dikenal dengan INPRES 10/73 yang dibangun di ibukota kecamatan yakni Kelurahan Kahu. Kemudian 2 tahun selanjutnya didirikan lagi sekolah INPRES 10

Untuk jenjang menengah di Kecamatan Bontocani baru ada pada tahun 1974 dan itupun kelas jauh dari Kecamatan Kahu. Dua tahun kemudian tepatnya 1976 sekolah ini ditutup dan siswanya dipindahkan ke Kecamatan Kahu. Para siswa ini berjalan sejauh 20 km untuk mengenyam pendidikan SMP. Pada tahun 1977 pemerintah mengumumkan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Bontocani.

Pemerintahan Letnan Saguni Dewa dianggap memberikan dampak positif pada perkembangan Kecamatan Bontocani. Meski tidak begitu pesat, namun sosok Letnan Saguni Dewa diketahui sering memberikan motivasi untuk terus menambah ilmu pengetahuan dengan cara menempuh pendidikan.

c. Bidang Ekonomi

Kecamatan Bontocani memang merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur dan iklim yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Hampir seluruh masyarakat menggantungkan perekonomiannya pada pertanian dan juga peternakan. Keadaan pada saat Pemerintahan Saguni Dewa sebagai camat kedua di Bontocani jauh lebih baik dibanding pemerintahan Andi Mappanganro.

Perubahan sistem perekonomian masyarakat dari sistem perekonomian tradisional menuju pertanian yang lebih modern terjadi pada pemerintahan Saguni Dewa. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan "LAPPO ASE" yakni kebijakan peningkatan kualitas pertanian dengan cara pendampingan dan bantuan dari pemerintah. Pada awal penerapan kebijakan ini, masyarakat Bontocani yang latar belakang pendidikannya rendah tidak menerima dengan baik kebijakan tersebut.

Kebijakan *lappo ase* memang awalnya mewajibkan seluruh masyarakat untuk menerima paket bantuan pemerintah yang terdiri dari bibit padi yang unggul, pupuk dan beberapa alat pertanian (Syukur, 2019). *Lappo ase* ini dipusatkan di Desa Pammusureng sebagai tempat penampungan sementara sebelum didistribusikan ke masyarakat. Karena bibit tradisional yang dipergunakan masyarakat tidak cocok untuk dipupuk, maka mereka menganggap awalnya pupuk itu sesuatu yang tidak berguna. Namun untuk bibit yang dibagikan ketika dilakukan pemupukan maka hasilnya jauh lebih baik. Hingga pada saat itu pertanian di Bontocani mulai berkembang dan perekonomian masyarakat pun jauh lebih baik.

Selain *lappo ase*, pada pemerintahan Sagunu Dewa juga mulai didistribusikan komoditi unggulan Kecamatan Bontocani yaitu kemiri, kopi, kakao dan cengkeh. Pemberian lahan dan pembukaan hutan dilaksanakan pemerintah dengan hitungan 2 hektare untuk setiap kepala rumah tangga untuk ditanami komoditi tersebut. Pada saat peningkatan kualitas perekonomian di Bontocani sedikit demi sedikit mulai meningkat.

d. Infrastruktur

Pembangunan di berbagai bidang tentunya terus diupayakan oleh pemerintah demi kemajuan bersama. Infrastruktur sebagai penunjang kelangsungan hidup masyarakat baik untuk mobilitas maupun upaya peningkatan peayanan. Periode pemerintahan Saguni Dewa dianggap sebagai masa keemasan Kecamatan Bontocani. Meski pembangunan pada saat itu dilaksanakan secara swadaya dan gotongroyong dengan metode bergiliran.

Akses jalan yang menghubungkan antar satu desa yang dulunya hanya dilalui oleh pejalan kaki, mampu dilakukan perluasan meski dilaksanakan secara gotong royong. Melihat semangat masyarakat, Saguni Dewa kemudian mengusulkan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten dan pusat. Hingga pada akhirnya akses jalan antar desa di Kecamatan Bontocani sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Kemudian dalam periode akhir pemerintahannya pencapai tertinggi bagi masyarakat Bontocani karena jalan dari Kecamatan Kahu menuju Bontojai dilakukan pengerasan dan pengaspalan. Tercatat sepanjang sejarah Kecamatan Bontocani, hanya pada tahun 1978 jalan dari Kecamatan Kahu menuju Desa Bontojai yang panjangnya 20 km dilakukan pengaspalan.

Penataan perumahan rakyat yang dulunya masyarakat hidup berpindah membuka hutan untuk kegiatan pertanian, kemudian diarahkan untuk dilakukan penataan yang diarahkan dilaksanakan di pinggir jalan raya. Penataan perumahan masyarakat tersebut diistilahkan dengan pembangunan kampung baru. Berikut hasil wawancara dengan Jerre:

“Waktu gerilya kan kita hidup di hutan bersembunyi, setelah perang gerilyah aman kita hidup pindah-pindah untuk menanam padi sama jagung. Nah setelah Pak Saguni ini yang jadi camat kita disuruh untuk buat rumah dipinggir jalan. Kita disuruh buat rumah yang mirip semua mulai dari modelnya, catnya dan lain-lain. Kita ditunjukkan saja lokasinya dan dibiayai semua pembangunannya (Jerre, 2021).”

Dari pendapat tersebut bahwa setelah kondisi di Kecamatan Bontocani mulai kondusif masyarakat diarahkan untuk penataan perumahan rakyat serta dibiayai dalam pembuatan rumah. Hal tersebut tentunya demi kelangsungan hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum berdirinya menjadi sebuah kecamatan, sistem pemerintahan di daerah Bontocani adalah pemerintahan kerajaan lokal (Akkarungeng). Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintahan daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk daerah-daerah tingkat II yang daerah bawahannya adalah distrik. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.1100/1961, dibentuk 21 Distrik di Daerah Tingkat II Bone, salah satunya yaitu Distrik Cani yang membawahi beberapa daerah sebagai wilayahnya. Kemudian pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.2067/1961 tanggal 18 Desember 1961 menyatakan semua Distrik berubah nama menjadi sebuah kecamatan. Maka dinamakanla Kecamatan Bontocani berdasarkan penggabungan dua *Akkarungeng* (kerajaan) yaitu Cani dan Bontorihu.
2. Setelah Bontocani resmi menjadi sebuah kecamatan, penataan struktur pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas masyarakat melalui pendidikan terus dilakukan. Dalam periode pemerintahan Andi Mappanganro sebagai camat pertama yang menjabat di Kecamatan Bontocani tidak beradampak besar bagi masyarakat pada umumnya. Hal demikian disebabkan karena pada saat itu pemerintahan resmi sebagai sebuah kecamatan tentunya butuh waktu untuk melakukann penyesuaian. Selain itu, kondisi keamanan yang belum kondusif juga membuat roda pemerintahan dan pembangunan di beberapa sektor sulit untuk dilaksanakan. Kemudian pada periode pemerintahan Letnan Saguni Dewa yang latar belakangnya seorang tentara yang sekaligus menjabat sebagai seorang camat memberikan dampak yang positif. Perkembangan Kecamatan Bontocani di beberapa bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan infrastruktur mengalami peningkatan yang jauh lebih baik.
3. Bontocani dulunya sebuah daerah yang sangat tertinggal kemudian setelah menjadi sebuah kecamatan terutama dalam periode 1960-1979 terlihat jelas mengalami perkembangan yang positif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur penunjang memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdal. (2021). *Wawancara*.
- Akbar, M., Amirullah, A., & Bahri, B. (2020). Arung Tonra Andi Palantei, 1905-1950. *Attoriolong*, 18(2).
- Ambo, A. (2021). *Wawancara*.
- Bahri. (2016). Perebutan Panggadereng di Kerajaan LOKal di Jazirah Sulawesi Selatan Abad XV-XVII. *Atlantis Press, Volume 12*.
<http://eprints.unm.ac.id/18730/>
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah*. Kemitraan.
- Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Hamid, A. R., & Majid, M. S. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ombak.
- Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Jerre. (2021). *Wawancara*.
- Manna. (2021). *No Title*.

- Muhammad Mujtaba Habibi. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi daerah kota/kabupaten. *Jurnan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(02).
- R Moh Ali. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Pelangi Aksara.
- Sejarah, T. P. J. P. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Balai Penerbit.
- Sugeng Priyadi. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Ombak.
- Sugeng Priyadi. (2015). *Historiografi Indonesia*. Ombak.
- Syukur, M. (2019). *Pergeseran Relasi Gender Pada Keluarga Bugis (Studi Kasus pada Perempuan Pedagang Antarpulau di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone)*. Leisyah.
- Syukur, M. (2017). Menakar Integrasi Kebangsaan. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 293–300.
- Widjaja, H. A. W. (2012). *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara.

